SIKAP DAN PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DI INDONESIA

IAN M. DUTTON, KUN S. HIDAYAT, TIENE GUNAWAN
Coatal Resources Management Project
e-mail: crmp@cbn.net.id

FEDI SONDITA
Proyek Pesisir PKSPL-IPB Bogor
e-mail: learningtm@indo.net.id

JAN STEFFEN
Yayasan KEHATI
e-mail: jsteffen@cbn.net.id

DOUG STOREY
John Hopkins University
Center for Communication Program-Indonesia Field Office
e-mail: dstorey@jhuccp.or.id

REED MERRIL
NRM Program/EPIQ
reed @ibm.net

dan

SYLVIANITA
Terangi
e-mail: terangi@cbn.net.id

ABSTRAK

Adalah suatu hal yang patut dipertanyakan bahwa dalam suatu negara yang luas lautannya jauh lebih besar dari luas daratannya belum pernah ada survei nasional mengenai persepsi masyarakat terhadap kekayaan laut yang dimilikinya. Untuk mengedepankan hal ini, pada tahun 2000 yang lalu Proyek Pesisir menyelenggarakan survei mengenai sikap dan persepsi masyarakat terhadap sumberdaya pesisir dan lautan Indonesia untuk pertama kalinya. Hasil survei ini dapat digunakan sebagai tolok ukur masyarakat Indonesia terhadap konservasi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan.

Jumlah sampel yang diambil adalah 1600 responden dari berbagai wilayah di propinsi Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Jabotabek. Sampel kemudian diklasifikasikan ke dalam lokasi tempat tinggal responden, yaitu pedesaan di wilayah pesisir dan wilayah pedalaman, serta wilayah urban pada setiap propinsi. Pada setiap lokasi, survei dilaksanakan dengan mewawancarai orang dewasa yang ada dalam rumah tangga yang dipilih secara acak sehingga keseimbangan gender dan usia tercapai.

Ada dua kesimpulan utama yang didapat dari survei. Yang pertama adalah sangat rendahnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat Indonesia secara umum mengenai keberadaan dan letak Indonesia. Rendahnya pengetahuan ini juga mencakup minimnya pengetahuan mengenai sumberdaya pesisir dan lautan Indonesia yang berlimpah bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Di samping itu ada perbedaan yang mendasar dalam pengetahuan dan pengertian masyarakat yang menjadi kendala bagi keikutsertaannya dalam program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang lebih baik. Namun demikian, di luar keterbatasan yang ada, masyarakat secara umum menyadari pentingnya sumberdaya pesisir dan laut bagi kehidupan sehari-hari.

Hal kedua dan yang lebih penting adalah bahwa masyarakat Indonesia sangat memperhatikan kondisi lautnya dan pelestarian nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir dan laut tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan yang kuat bagi Departemen Kelautan dan Perikanan. Dari hasil survei juga terlihat bahwa pencemaran laut memiliki peringkat keenam sebagai hal yang dianggap sebagai masalah nasional yang mendesak untuk ditangani, di atas masalah-masalah kejahatan, kemiskinan, dan masalah kondisi jalan. Survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat bersedia untuk lebih terlibat secara aktif dengan pemerintah setempat dan institusi lainnya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Namun demikian, masyarakat memerlukan pendidikan, petunjuk, serta kepercayaan dalam keterlibatannya tersebut. Makalah ini merekomendasikan agar metode yang digunakan dalam survei ini direplikasi dalam survei yang akan datang di propinsi-propinsi lain di Indonesia serta dalam survei-survei nasional yang sebaiknya dilakukan secara rutin untuk memastikan tercakupnya sikap dan persepsi masyarakat dalam agenda kebijakan kelautan nasional.

Kata-kata kunci:tolak ukur, survei, persepsi, sikap masyarakat, sumberdaya pesisir dan laut.

ABSTRACT

Somewhat surprisingly in a country that is more sea than land, there has never been a comprehensive national survey of how Indonesians relate to their marine heritage. To redress this glaring gap in our knowledge, in 2000, Proyek Pesisir commissioned the first national benchmark study of public attitudes towards the conservation and use of marine resources.

The survey sampled 1,600 households divided equally between Lampung, East Kalimantan, North Sulawesi and Jabotabek. The sample was further stratified by location of household; rural villages in coastal and inland and urban centres in each province. In each location, a trained surveyor administered the interview survey to an adult in each household randomly selected so as to achieve a gender and age balance.

Two key conclusions emerged from the survey. Firstly, Indonesians are poorly informed about the geography, social and economic significance of Indonesia's vast coastal and marine estate. There are significant gaps in basic knowledge and understanding that limit the ability of individuals to effectively engage in programs to better manage coastal and marine resources. Despite these limitations, they recognize that marine resources are very important to their well being.

Secondly and more significantly, Indonesians are very concerned about the state of the nation's seas and their subsequent ability to sustain the many values that Indonesians ascribe to coastal and marine resources. Clearly there is a strong constituency for the new Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Pollution of the sea is ranked as the sixth most pressing national problem, above issues such as crime, poverty and roads. Importantly, the survey revealed that Indonesians are willing to engage moe actively with local government and others to more effectively manage coastal and marine resources but need education, guidance and trust. It is proposed that the methods pioneered in this study should be replicated in future surveys of other provinces and in more regular national surveys so as to ensure public attitudes are incorporated in the national marine policy agenda.

Keywords: benchmark, perception, community attitude, coastal and marine resources.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dipicu oleh pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan di akhir 1999. Dalam suatu pembicaraan awal dengan Menteri Kelautan dan Perikanan serta staf seniornya, terungkap kurangnya informasi yang dapat diandalkan mengenai persepsi dan sikap masyarakat tentang sumberdaya laut. Kurangnya informasi tersebut tidak hanya mencakup kurangnya pengetahuan tentang bagaimana anggapan berbagai lapisan masyarakat terhadap sumberdaya laut, tetapi juga termasuk tidak adanya konsensus yang valid mengenai aspirasi masyarakat bagi pengelolaan sumberdaya tersebut di masa datang.

Dalam pembicaraan tersebut Pak Sarwono mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok stakeholders kelautan di Indonesia tidak memiliki kesamaan visi dalam pembangunan sumberdaya laut meskipun pada saat yang bersamaan terdapat perhatian yang hampir merata terhadap ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, terungkap adanya pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kondisi cadangan sumberdaya tertentu serta ketidakpastian mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di masa otonomi daerah. Hal yang sama juga diungkapkan dalam gagasan reformasi kebijakan kelautan lain baru-baru ini (Dahuri dan Dutton, 2000).

Dari konsultasi tersebut, terlihat bahwa pengetahuan akan pandangan masyarakat secara umum terhadap sumberdaya pesisir dan laut serta pemanfaatannya sangat diperlukan sebagai masukan kepada program awal di Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru dibentuk tersebut. Proyek Pesisir kemudian mengedepankan kebutuhan tersebut sebagai bagian dari programnya di Tahun Keempat yaitu mendukung program kebijakan pesisir nasional (Proyek Pesisir, 2000). Suatu survei mengenai hal yang sama juga diperlukan sebagai masukan bagi kegiatan outreach dan pendidikan lingkungan hidup. Secara khusus, survei ini diperlukan bagi pengalokasian sumberdaya (dana) yang terbatas untuk mengedepankan kebutuhan pendidikan dan penyadaran masyarakat mengenai sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia. Survei ini dirasakan sangat tepat waktunya karena pada saat yang bersamaan program COREMAP John Hopkins menyelesaikan survei mengenai persepsi dan sikap sejenis di Riau, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya (Storey, 2000; Strain et al., 2000).

METODE

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dari mitra-mitra Proyek Pesisir terpenuhi serta untuk memastikan bahwa Proyek Pesisir memanfaatkan keahlian yang ada dalam pelaksanaan survei ini, suatu Panitia Pengarah (steering committee) kemudian dibentuk. Anggota Panitia Pengarah survei terdiri dari perwakilan dari:

- John Hopkins University (untuk mengkaitkan survei dan kegiatan outreach Proyek Pesisir dengan kegiatan COREMAP-nya)
- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor
- Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (BANGDA), Departemen Dalam Negeri
- USAID-BAPPENAS EPIQ/NRM Sub-program Kawasan Lindung
- Staf Outreach dan staf Teknis Proyek Pesisir

Panitia Pengarah mengkaji survei lokal dan global yang berkaitan dan relevan, serta kemudian mengembangkan kerangka acuan bagi tender pelaksanaan survei. Pelaksana survei yang dipilih kemudian adalah Consensus - MBL. Ada sejumlah kesulitan dalam pelaksanaan survei, khususnya dalam mengembangkan pertanyaan dengan bahasa sederhana yang dapat dengan mudah dipahami serta dalam memastikan bahwa jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang benar-benar mencerminkan kondisi sesungguhnya. Panitia Pengarah kemudian mengembangkan beragam protokol survei dan jenis-jenis pertanyaan untuk diuji. Setelah survei mengalami revisi sebanyak tiga kali, uji coba pelaksanaan sebanyak dua kali, dan pelatihan pewawancara, survei dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2000. Dari setiap wilayah, yaitu Jabotabek, Lampung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur, diambil sampel masing-masing 400 orang responden. Ke 1600 responden di setiap lokasi kemudian distratifikasi dengan mengelompokkan penduduk di wilayah perkotaan (urban), wilayah desa pedalaman, dan wilayah desa pesisir. Rumah tangga dan orang dewasa dalam rumah tangga terpilih yang menjadi target wawancara dipilih secara acak dengan berdasarkan pada informasi Rukun Tetangga. Wawancara terhadap responden dilakukan selama kira-kira satu jam.

TEMUAN-TEMUAN PENTING

Survei yang dilaksanakan menghasilkan sejumlah besar data dan informasi yang secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga kelompok.

PENGETAHUAN MASYARAKAT

Pengetahuan mengenai negara kepulauan Indonesia secara umum sangat buruk. Hal ini mencerminkan kegagalan kurikulum dan media pendidikan nasional untuk dapat menjelaskan dasar-dasar pengetahuan geografis, serta kepentingan sosial dan ekonomi dari laut yang dimiliki Indonesia. Ragam pengetahuan wanita dibandingkan pria sangat kecil, demikian pula ragam pengetahuan ditinjau dari aspek usia.

Contoh kegagalan ini adalah sebagai berikut:

- Sekitar 20% orang Indonesia tidak tahu di laut mana letak Indonesia

- Sebagian besar masyarakat (52%) menganggap bahwa Indonesia memiliki kurang dari 2500 buah pulau (jumlah yang benar adalah 17.500 lebih!). Lebih jauh, 24% dari responden tidak memiliki gambaran sama sekali mengenai jumlah pulau di Indonesia
- Hanya empat persen dari masyarakat tahu bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia; 43% menganggap bahwa Jepang memiliki spesies ikan dan karang yang terbanyak, 23% menganggap Cina yang memiliki paling banyak spesies ikan dan karang, 17% Filipina dan Malaysia, 15% Amerika Serikat, dan 14% Australia.
- Persepsi masyarakat beragam sejalan dengan ragam lokasi dimana mereka tinggal dan terlihat kurangnya pengetahuan dalam hal-hal yang mendasar sekalipun mengenai fenomena yang ada di luar wilayah tinggalnya. Sebagai contoh, 28% dari responden di Jabotabek dan 23% responden Lampung menganggap bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang terbesar; hanya 13% dari responden Kalimantan Timur dan 11% dari responden Sulawesi Utara memiliki anggapan yang sama. Hal yang sama mengenai terumbu karang, 20% reponden yang tinggal di desa pedalaman menganggap bahwa terumbu karang adalah benda mati, sementara hanya sembilan persen dari penduduk pesisir memiliki anggapan yang sama.
- 79% masyarakat tidak tahu nama Menteri Kelautan dan Perikanan dan 41% tidak mengetahui Departemen yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pesisir dan lautan (hanya 19% yang dapat mengidentifikasi Departemen yang baru ini secara benar).
- Yang dianggap tergolong dalam sumberdaya laut adalah ikan, rumput laut, kerang, garam, mutiara dan udang, sementara minyak, tripang, bintang laut, ubur-ubur, serta mangrove adalah hal-hal yang tidak diidentifikasi sebagai sumberdaya laut.
- Kampanye Selamatkan Terumbu Karang (SeKarang!) dikenal secara luas melalui media - 52% responden mengatakan pernah melihat logo SeKarang! tersebut dibandingkan dengan 46% logo WWF, 14% logo Proyek Pesisir, dan 11% logo KEHATI.

PEMANFAATAN SUMBERDAYA

Karena sebagian besar data yang didapat dari survei berkaitan erat dengan lokasinya, generalisasi yang dilakukan dalam pemanfaatan

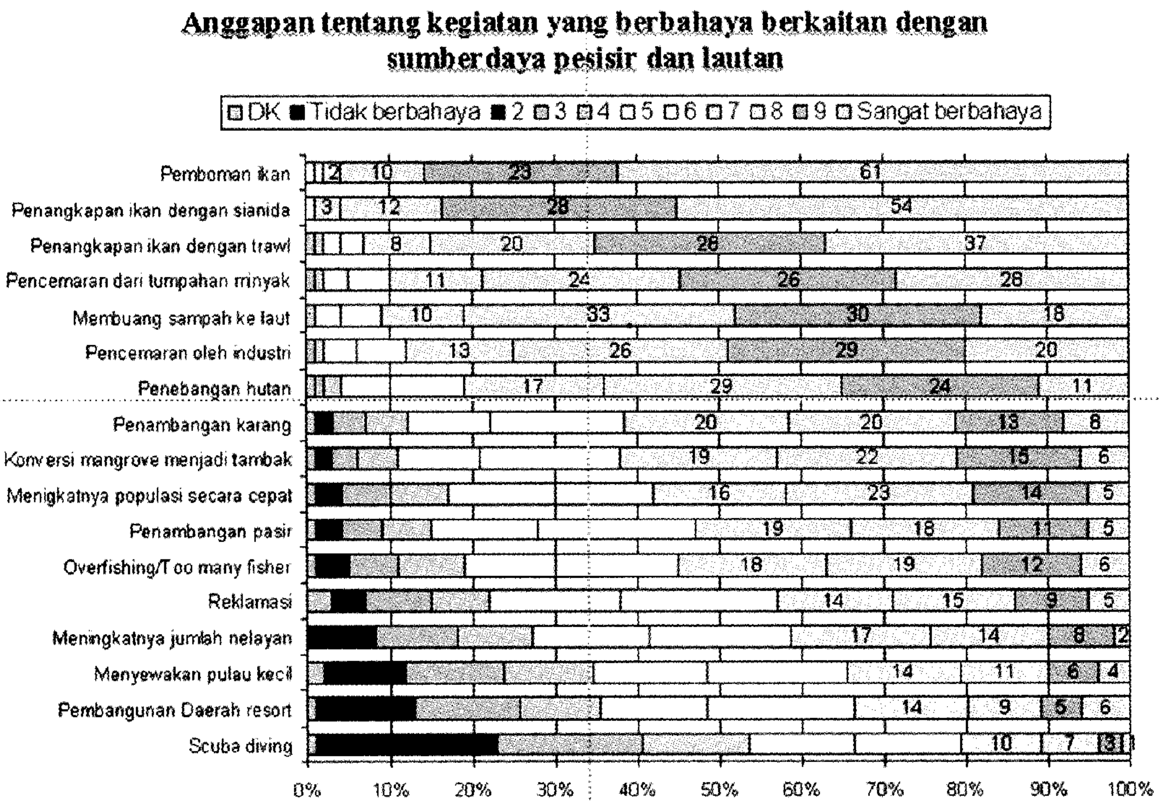

Gambar 1. Persepsi Masyarakat mengenai Ancaman terhadap Sumberdaya Pesisir dan Laut

sumberdaya pesisir dan laut sangat terbatas. Terdapat tiga temuan yang menarik untuk diperhatikan, yaitu:

- Pemanfaatan sumberdaya laut yang utama oleh masyarakat secara umum adalah pemanfaatan sumberdaya yang dipandang sebagai "sumber pangan untuk dikonsumsi pribadi/keluarga", "sumber pangan untuk dijual", "sarana transportasi laut", serta "sumber produk-produk laut untuk dijual secara lokal" (misalnya pasir, kerang, dan lain lain). Tiga jenis sumberdaya laut yang dianggap sangat penting bagi rumah tangga adalah ikan (99%), garam (84%), udang (58%), cumi-cumi (47%), kepiting (33%), kerang (28%), rumput laut (27%) dan pasir (17%).
- Melancong adalah rekreasi yang populer di wilayah pesisir dan laut (89%), diikuti oleh berenang (42%), memancing (6%), sembahyang (5%), makan (4%), dan snorkeling/menyelam, berjalan-jalan, bermain, dan bersantai (masing-masing kurang dari 2%).
- 73% orang Indonesia dilaporkan dapat berenang, dengan presentasi lebih besar bagi penduduk di wilayah pesisir (82% vs. 68% penduduk pedalaman). Namun demikian, 70% dari yang perenang-perenang tersebut hanya berenang tiga bulan sekali. Ada perbedaan besar dalam jumlah yang tidak dapat berenang - hanya 11% pria dilaporkan tidak dapat berenang dibandingkan dengan 44% wanita.

SIKAP DAN PERHATIAN MASYARAKAT

Sebagian besar pertanyaan dalam survei ini difokuskan pada sikap dan anggapan masyarakat mengenai kondisi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Dari temuan berikut ini (Gambar 1) terlihat bahwa meskipun tingkat pengetahuan umum masyarakat rendah, terlihat bahwa ada perhatian dan rasa kepentingan yang kuat dalam isu-isu kelautan serta terdapat dukungan (konstituen) yang signifikan dalam perbaikan perngelolaan sumberdaya tersebut.

Responden menempatkan "perlindungan laut terhadap pencemaran" di urutan keenam dari masalah-masalah di Indonesia yang dianggap mendesak untuk segera ditangani. Urutan di atasnya (dari urutan ke satu hingga ke lima) adalah masalah-masalah biaya hidup, pendapatan rumah tangga, biaya pendidikan, pengangguran, dan keamanan. Isu perlindungan laut terhadap pencemaran tersebut berada di atas masalah seperti krisis ekonomi, masalah sampah, jalan rusak, kejahatan/kriminal, kemiskinan, dan stabilitas politik.

Dalam hal pentingnya sumberdaya alam, responden menempatkan isu tersebut pada urutan di bawah perhatian terhadap isu penghasilan, kemampuan untuk menghidupi keluarga, standar hidup, dan pendidikan. Namun pentingnya sumberdaya alam menempati peringkat di atas pentingnya keinginan untuk membeli baju baru dan menyelenggarakan pesta perkawinan yang besar. Selanjutnya dapat disimpulkan adalah bahwa responden memiliki perhatian pada kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dapat ditunjukkan dari 47% responden yang menganggap bahwa kondisi laut di Indonesia semakin memburuk (dibandingkan dengan 14% yang menganggap kondisinya sama saja dan 25% yang menganggap bahwa kondisi laut semakin membaik).

Gambar 1. di bawah ini menunjukan secara rinci hal-hal yang dianggap sebagai ancaman terhadap sumberdaya serta kualitas lingkungan pesisir dan laut. Pertanyaan lebih rinci yang diajukan kepada responden lebih jauh memberikan gambaran mengenai sikap dan persepsi masyarakat akan kegiatan industri kelautan dan kegiatan yang berkaitan sumberdaya laut. Berikut ini adalah butir-butir yang mencerminkan sikap dan persepsi tersebut.

- Nelayan yang meggunakan teknik ilegal harus dihukum (82%)
- Kura-kura laut dan lumba-lumba yang tertangkap harus dilepaskan kembali (81.5%)
- Ikan yang belum cukup umur harus dilepaskan kembali ke laut (78%)
- Saya bersedia untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut (72%)
- Kembangkan sistem musim tertutup bagi penangkapan ikan sehingga cadangan sumberdaya perikanan dapat pulih kembali (70%)
- Bila masyarakat tidak berbuat apapun, kita tidak dapat lagi tergantung pada sumberdaya laut (66%)
- Kerusakan hutan akan berakibat pada kerusakan wilayah pesisir dan laut (64%)

Gambar 2 berikut ini merinci lembaga-lembaga atau kelompok yang berkepentingan (stakeholders) yang dirasakan masyarakat sebaiknya dipercayai untuk mengelola sumberdaya pesisir dan lautan. Pandangan ini memberikan gambaran lebih jauh mengenai penekanan akan pentingnya keragaman keahlian dan lembaga yang terlibat dalam menangani masalah pesisir dan lautan yang kompleks.

DISKUSI

Temuan-temuan survei mengungkapkan fakta bahwa masyarakat Indonesia menyadari pentingnya sumberdaya pesisir dan lautan sebagai sumber penunjang kehidupannya. Hal ini tercermin dari anggapan bahwa sumberdaya pesisir dan laut merupakan sumber utama bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian besar terhadap ketersediaan sumberdaya pesisir dan lautan bagi generasi yang akan datang. Di samping itu, masyarakat secara umum bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya serta ekosistem pesisir dan laut.

Berlawanan dengan kenyataan di atas, fakta menunjukan bahwa pengetahuan dasar mengenai sumberdaya pesisir dan laut terutama bagi pengelolaannya sangat kurang. Keterbatasan pengetahuan dasar tersebut memicu ketidakmampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan. Tidak terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan pemanfaatan sumberdaya akan berakibat pada tidak terwakilinya kepentingan masyarakat tersebut. Lebih jauh, dampak positif pengelolaan dan/atau pemanfaatan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Kenyataan di atas merupakan hal yang terkait satu sama lain. Di satu pihak, masyarakat ingin terlibat dalam pengelolaan sumberdaya, sementara di pihak lain, pengetatuhan dasar yang dimiliki kurang. Hal ini secara nyata ditunjukan dalam hasil survey bahwa masyarakat memerlukan bimbingan, petunjuk, serta koordinasi dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Untuk memutuskan mata rantai tersebut, perhatian yang khusus harus diberikan kepada pendidikan umum (public educations). Hal ini dapat dilakukan melalui pembenahan kurikulum di bidang pendidikan formal, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penyuluhan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, serta upaya-upaya

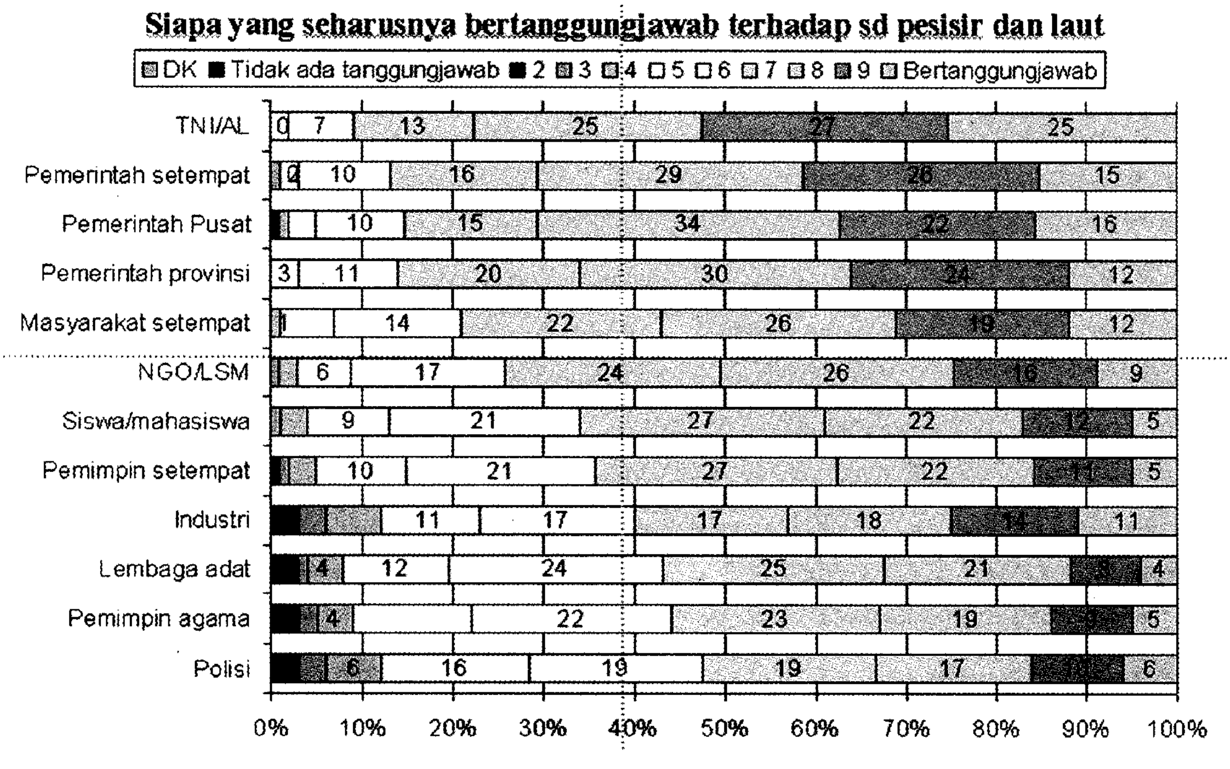

Gambar 2. Peringkat yang diberikan masyarakat mengenai siapa yang harus diberi tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

pembangunan kemampuan kelembagaan di instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, utamanya Departemen Kelautan dan Perikanan.

KESIMPULAN

Hasil survei nasional ini menyajikan tiga tantangan utama bagi Departemen Kelautan dan Perikanan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kebijakan dan pengelolaan kelautan Indonesia.

Yang pertama adalah kenyataan bahwa pengetahuan formal masyarakat Indonesia tentang sumberdaya pesisir dan laut yang ada kurang. Hal ini berakibat pada kurangnya dasar pemikiran bagi pengambilan keputusan tentang pemanfaatan langsung sumberdaya pesisir dan laut tersebut. Di samping itu kenyataan di atas mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat untuk berperan langsung dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan kelautan.

Yang kedua adalah masyarakat Indonesia menempatkan nilai yang tinggi bagi sumberdaya pesisir dan laut bagi tujuan pemanfaatan fungsional (misalnya sebagai sumber pangan) dan amenitas (misalnya rekreasi). Masyarakat memberikan perhatian yang tinggi dalam hal penurunan nilai sumberdaya pesisir dan laut serta mengkaitkan kualitas sumberdaya tersebut pada kualitas hidup mereka dan bersedia untuk ikut serta dalam upaya tersebut.

Yang terakhir adalah bahwa dalam perumusan kebijakan bagi wilayah pesisir dan lautan, para penentu kebijakan harus memberikan perhatian penuh baik kepada kepentingan masyarakat secara umum dan kepentingan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat tersebut. Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga formal pada saat ini sangatlah rentan. Efektivitas bentuk-bentuk pengelolaan yang telah direformasi atau bentuk-bentuk pengelolaan baru akan sangat tergantung pada kepercayaan publik yang harus dibangun sejalan dengan proses kebijakan. Di samping itu, efektivitas pengelolaan tersebut juga akan tergantung pada perhatian yang diberikan kepada konstituen yang lebih luas yang ada dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.

Makalah ini merekomendasikan kampanye pendidikan masyarakat yang terfokus yangsangat diperlukan untuk membangunan basis pengetahuan bagi kegiatan-kegiatan pengelolaan dan kebijakan sumberdaya. Di samping itu, bimbingan, dukungan, serta koordinasi dengan stakeholders yang lain yang diperlukan oleh masyarakat diberikan dengan proporsi yang tepat. Hal yang juga penting adalah untuk selalu memonitor denyut nadi pendapat masyarakat, sehingga survei semacam ini secara rutin sangat diperlukan dan perluasan wilayah survei ke propinsi-propinsi yang belum tercakup sangat direkomendasikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Farnel dan Ibu Astiti Suhirman dari MBL-Consensus atas bantuannya yang diberikan. Terima kasih kami haturkan pula kepada staf lapangan Proyek Pesisir yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam pelaksanaan wawancara di propinsi-propinsi Lampung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Versi bahasa Inggris yang lebih singkat dari paper ini dipublikasikan di NRM Newsletter.

REFERENSI

Dahuri, R. and I.M. Dutton (2000) Integrated Coastal and Marine Management Enters a New Era in Indonesia, Integrated Coastal Zone Management, 1:11-16.

Farnell, J. and A. Suhirman (2000) National benchmark Study: Exploration and measurement of Public Attitude to Conservation and use of Marine Resources, MBL Consensus Market Research Summary Report to Proyek Pesisir, Jakarta, 108pp.

Proyek Pesisir (2000) Year 4 Workplan, Coastal Resources Management Project Administration Report AR/00/01/E, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Jakarta.

Storey, D. (2000) Sikap-sikap dan perilaku mengenai pengelolaan lokal sumerdaya terumbu karang: model-model dari survei masyarakat di Riau, Sulawesi Selatan dan Papua Utara (Attitudes and behaviors related to local management of marine resources: models from a survey of the public in Riau, South Sulawesi and Papua, presentation to the Second National Coastal Conference (Konas II), 15-17 May, 2000, Makassar, 22pp.

Strain, J., S. Thomson and B. Rahardian (2000) Coral Reef and Marine Resource Public Awareness: Findings from Benchmark Research, Taylor Nelson Sofres and Johns Hopkins University, Jakarta.